





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Stabilitas sistem keuangan pada semester I 2017 relatif stabil dengan didukung oleh meningkatnya permodalan dan likuiditas perbankan serta stabilnya pasar keuangan. Secara umum hal ini tercermin dari indikator ISSK dan IRSP tercatat lebih baik dibandingkan semester terdahulu meskipun masih dibayangi oleh masih cukup tingginya risiko kredit. Intermediasi perbankan tercatat melambat namun masih menunjukkan tren positif, yang khususnya didorong oleh proyek infrastruktur pemerintah. Selain itu, stabilitas sistem keuangan rentan dipengaruhi oleh meningkatnya risiko pasar keuangan global akibat kenaikan FFR dan rencana normalisasi balance sheet oleh The Fed serta faktor eksternal global lainnya yang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pergerakan pasar keuangan regional dan domestik.

Stabilitas ekonomi domestik relatif terjaga meskipun beberapa risiko perlu terus dicermati. Perekonomian domestik menunjukkan tingkat risiko yang terkendali didukung oleh inflasi yang berada pada kisaran yaitu  $4\pm 1\%$ , meskipun meningkat terutama disebabkan oleh inflasi administered prices. Selain itu, pemulihan ekonomi terus berlanjut yang didukung oleh meningkatnya investasi, tumbuhnya ekspor dan tetap kuatnya konsumsi rumah tangga. Neraca pembayaran tetap mencatat surplus didukung oleh surplus transaksi modal dan finansial. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya aliran masuk modal portofolio dan investasi langsung seiring dengan positifnya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Positifnya surplus neraca pembayaran tersebut diikuti oleh pergerakan nilai tukar Rupiah yang cenderung menguat. Hal ini didukung oleh volatilitas rupiah yang rendah dan besarnya aliran masuk modal asing serta semakin dalamnya pasar keuangan Indonesia.

Di tengah ketidakseimbangan perekonomian global dan terjaganya perekonomian domestik, masih terdapat beberapa sumber ketidakseimbangan yang mengganggu stabilitas sistem keuangan selama semester I 2017 antara lain terdiri dari : (i) Prosiklikalitas Penyaluran Kredit Perbankan dan Kontraksi Siklus Keuangan ; (ii) Keterbatasan Ruang Fiskal; (iii) Risiko ULN Korporasi Non Bank yang masih berada pada level yang cukup tinggi; (iv) Tingginya Kepemilikan Nonresiden di Pasar Keuangan Domestik.

Seiring dengan masih berlangsungnya tren perlambatan kredit, siklus keuangan Indonesia masih berada pada fase kontraksi yang dipengaruhi oleh masih rendahnya peningkatan permintaan agregat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% (yoy) walaupun sedikit meningkat dibandingkan posisi akhir 2016 sebesar 4,94% (yoy). Sementara itu, prosiklikalitas penyaluran kredit terhadap pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan rasio NPL perbankan yang dapat mendorong industri perbankan menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan penyaluran kredit. Perilaku prosiklikalitas kredit tersebut perlu diantisipasi agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam.

Dari sisi fiskal, penyerapan belanja di tengah perbaikan kinerja penerimaan pemerintah telah berkontribusi terhadap perbaikan ruang fiskal pemerintah. Realisasi belanja yang terbatas telah mencatat defisit sebesar 1,3% terhadap PDB hingga Juni 2017, meskipun masih lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 1,9% PDB. Sementara itu, kinerja penerimaan sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, kinerja perpajakan terindikasi menurun seiring turunnya kontribusi pajak nonmigas. Ruang fiskal yang masih lebar cenderung

mengurangi risiko terhadap sistem keuangan. Selain itu terjaganya kondisi likuiditas sistem keuangan juga merupakan dampak positif dari ekspansi pemerintah yang lebih terbatas.

Perkembangan perekonomian global dan domestik yang relatif membaik telah mendorong peningkatan Utang Luar Negeri (ULN). ULN tercatat mencapai sebesar USD335,29 miliar pada semester I 2017 dengan pertumbuhan 2,85% (yoy). Ditinjau dari sisi risikonya, porsi ULN swasta non-bank yang sebagian besar merupakan ULN jangka panjang menunjukkan tingkat potensi risiko yang relatif lebih terjaga. Namun demikian, dengan adanya peningkatan outstanding ULN pada periode laporan, potensi risiko ULN swasta non-bank tetap perlu dicermati sebagai salah satu sumber kerentanan di pasar keuangan domestik. Lebih dari itu, risiko terkait kemampuan korporasi untuk membayar ULN yang terindikasi dari debt-to-service ratio (DSR) Tier-1 masih cukup tinggi. Sebagai upaya untuk memitigasi risiko ULN korporasi, Bank Indonesia telah menerapkan rasio lindung nilai (hedging) terhadap seluruh korporasi nonbank yang memiliki ULN dalam valuta asing.

Sumber kerentanan lainnya dalam sistem keuangan yaitu berupa tingginya kepemilikan investor nonresiden pada pasar keuangan domestik. Pada pasar saham dan pasar SBN, kepemilikan asing sempat melonjak signifikan pada bulan Maret dan April 2017 karena sentimen positif dari penetapan status Indonesia menjadi Investment Grade oleh lembaga pemeringkat. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan investor luar negeri terhadap potensi dan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Namun di sisi lain terdapat potensi risiko pembalikan arus modal (capital reversal) dan kecenderungan volatilitas

transaksi, yang diantaranya dapat dipicu oleh external shock yang bersumber dari dinamika perekonomian atau pasar keuangan global misalnya kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang belum terantisipasi serta gejolak geopolitik di negara kawasan seperti Korea Utara.

Di tengah konsolidasi penyaluran kredit perbankan, pembiayaan perekonomian dari pasar keuangan selama semester I 2017 meningkat cukup tinggi. Peningkatan pembiayaan ini terutama bersumber dari kenaikan penerbitan obligasi korporasi dan sukuk serta melalui Initial Public Offering (IPO) dan right issue. Sentimen positif perekonomian global, membaiknya prospek ekonomi domestik serta peningkatan outlook sovereign rating merupakan beberapa faktor yang mendukung peningkatan pembiayaan pasar keuangan. Dari sisi harga, terlihat semakin kompetitifnya obligasi korporasi, khususnya rating peringkat AAA hingga A dibandingkan kredit perbankan khususnya untuk pembiayaan jangka panjang mendorong korporasi meningkatkan pembiayaan obligasi korporasi. Beberapa perusahaan juga melakukan pembiayaan melalui obligasi sebagai alternatif pembiayaan dari utang luar negeri seiring dengan peningkatan suku bunga global.

Searah dengan pertumbuhan pasar saham dan obligasi, tren positif juga terjadi di pasar Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dan Medium Term Note (MTN). Instrumen NCD diminati khususnya oleh emiten perbankan sebagai alternatif sumber pendanaan jangka pendek dibawah 1 tahun. Sementara itu, penerbitan MTN sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja (pengembangan usaha) dan refinancing. Meningkatnya pendanaan melalui penerbitan NCD dan MTN terutama dipengaruhi persyaratan penerbitan yang lebih mudah

serta tidak diwajibkannya pemenuhan rating pada saat penerbitan. Penerbitan PBI No 19/2/PBI/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang yang mengatur juga mendorong standarisasi instrumen NCD turut memberikan sentimen positif di pasar NCD serta mendorong perluasan basis investor NCD.

Secara umum risiko di pasar keuangan global dan domestik pada semester I 2017 relatif stabil dan cenderung membaik. Sentimen positif ini selanjutnya mendorong aliran dana asing masuk di pasar keuangan domestik. Volatilitas di PUAB rupiah, pasar valas, pasar saham dan pasar obligasi baik obligasi negara maupun obligasi korporasi pun menurun yang mengindikasikan penurunan risiko di pasar keuangan domestik. Di pasar valas, meski tren risiko menurun namun upaya berjaga-jaga terus dilakukan. Transaksi derivatif, khususnya swap terus meningkat yang mengindikasikan pendalaman pasar valas terus berlanjut serta memberikan alternatif instrumen bagi pelaku pasar untuk mengelola risiko valas. Di pasar SBN, tingginya demand atas SBN khususnya dari investor asing mendorong penurunan yield dan volatilitas yang cukup tajam. Derasnya inflow ini menyebabkan naiknya porsi kepemilikan investor asing mencapai hampir 40%. Yield SBN tenor 10 tahun pun turun di kisaran 6-7% dengan volatilitas di bawah 5%. Hal ini sejalan dengan perkembangan penurunan yield SBN di beberapa negara tetangga seiring dengan sentimen positif global. Di pasar saham, penguatan IHSG selama semester I-2017 yang mencapai 10% disertai tingginya PER dibandingkan negara kawasan patut diwaspadai. Kinerja emiten dalam mencetak laba akan menjadi perhatian utama investor, khususnya investor asing.

Searah dengan kinerja pasar keuangan secara keseluruhan, perkembangan pasar keuangan syariah juga menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh indeks saham syariah yang terus tumbuh, pangsa sukuk negara yang terus meningkat sebagai sumber pembiayaan APBN, serta reksadana syariah yang terus berkembang. Selain itu, sektor keuangan sosial juga mencatatkan perkembangan yang positif. Dana kumpulan zakat dan wakaf uang semakin meningkat.

Di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, sektor rumah tangga belum menunjukkan akselerasi yang sepadan. Hal tersebut tercermin dari pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menunjukkan tren yang melambat dan proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB menunjukkan penurunan. Namun demikian, rumah tangga memiliki optimisme terhadap kondisi perekonomian ke depan yang ditunjukkan dari meningkatnya pertumbuhan kredit konsumsi rumah tangga, membaiknya Indeks Penjualan Riil (IPR) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Kondisi sektor rumah tangga yang diperkirakan akan membaik tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan perbaikan kualitas kredit atau pembiayaan ke sektor rumah tangga bila dibandingkan semester I 2017.

Sementara itu di sektor korporasi pertumbuhan ekspor semester I 2017 membaik dibandingkan semester sebelumnya, namun demikian kinerja sektor korporasi masih dipengaruhi antara lain oleh belum kuatnya pemulihan ekonomi global dan harga beberapa komoditas yang belum membaik serta volatile.

Dalam situasi tersebut korporasi publik non keuangan berupaya meningkatkan efisiensinya sebagai upaya untuk menjaga kinerja keuangannya. Hal tersebut tercermin dari membaiknya indikator profitabilitas yang dipengaruhi oleh kenaikan laba bersih sebagai hasil dari efisiensi yang dilakukan korporasi.

Kredit perbankan ke sektor korporasi pada semester I 2017 tumbuh melambat, terutama dipengaruhi oleh perlambatan di sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi serta industri pengolahan. Meskipun demikian, kualitas kredit korporasi secara agregat cenderung mengalami perbaikan, tercermin dari penurunan rasio NPL gross korporasi menurun pada semester I 2017 dibandingkan semester sebelumnya. Perbaikan NPL dimaksud terutama dipengaruhi oleh perbaikan NPL di sektor pengangkutan pergudangan dan komunikasi, dan sektor industri pengolahan. Sebaliknya pada sektor pertambangan belum terjadi perbaikan NPL, yang antara lain disebabkan konsolidasi yang masih terjadi di sektor pertambangan akibat fluktuasi harga komoditas dan masih rendahnya permintaan dari pasar global.

Secara umum, pada semester I 2017 indikator perbankan nasional masih menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Perbankan dan nasabah cenderung berhati-hati dan bertindak wait and see dalam menyikapi perkembangan perekonomian terkini yang direfleksikan pada keputusan-keputusan dalam aktivitas perbankan mereka. Total aset perbankan tercatat masih mengalami pertumbuhan meski sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada semester sebelumnya.

Intermediasi perbankan masih mengalami perlambatan. Dari sisi perkreditan, perlambatan kredit didorong oleh masih lemahnya permintaan kredit baru dari korporasi dan perbankan yang cenderung berhati-hati sehubungan dengan meningkatnya risiko kredit. Korporasi masih cenderung wait and see terhadap perkembangan perekonomian terkini. Perlambatan kredit terutama terjadi pada bank kelompok BUKU 2, 3 dan 4. Masih belum membaiknya kinerja harga komoditas utama terutama batubara serta belum membaiknya daya beli masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan kredit dari nasabah. Sementara itu, perbankan juga relatif lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Peningkatan indeks lending standard ditengarai juga memicu penurunan minat debitur untuk mengajukan permohonan kredit. Pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah yang sedang gencar dilakukan serta upaya penurunan suku bunga kredit oleh perbankan relatif mampu menahan perlambatan kredit lebih jauh.

Sementara itu, DPK masih mengalami peningkatan terutama karena masih masuknya dana tax amnesty dan ekspansi keuangan Pemerintah. Peningkatan DPK tertinggi terjadi pada Bank BUKU 1. Sementara itu, peningkatan yang terjadi pada bank kelompok BUKU 4 terutama pada jenis simpanan Deposito di atas 2 miliar. Ketergantungan perbankan pada depositan inti dan sumber dana mahal masih relatif cukup besar meski perbankan terus berusaha untuk menambah sumber pendanaan dan mengalihkannya ke CASA.

Profitabilitas perbankan secara umum membaik seperti terlihat pada peningkatan rasio Return On Asset (ROA)

pada semua kelompok BUKU. Peningkatan ROA antara lain disebabkan efisiensi dalam pengelolaan aktivitas usaha antara lain penurunan biaya operasional untuk pembentukan cadangan penyisihan. Penurunan suku bunga perbankan sebagai upaya bank meningkatkan permintaan kredit belum sampai menggerus profitabilitas perbankan secara mendalam.

Pada semester I 2017, secara umum risiko perbankan dapat dijaga pada level yang aman. Risiko likuiditas perbankan relatif menurun terutama karena dana pihak ketiga yang terus mengalami peningkatan. Nasabah dan debitur cenderung menyimpan dananya di sistem perbankan dan menahan diri dalam pengembangan kegiatan usahanya. Rasio AL/NCD berada pada level yang tinggi (101,26%).

Risiko kredit mengalami sedikit peningkatan terutama pada kredit investasi dan kredit konsumsi. Rasio NPL gross hanya sedikit meningkat dari 2,93% menjadi 2,96%, setelah sempat menyentuh 3,16% di Februari 2017. Kinerja harga produk utama pertambangan terutama batubara serta daya beli masyarakat yang belum mengalami perbaikan secara signifikan merupakan faktor yang menjadi sebab peningkatan risiko kredit. Sementara itu, kredit restrukturisasi mengalami peningkatan relatif tinggi menjadi 5,53%. Peningkatan tersebut ditengarai masih berkaitan dengan relaksasi ketentuan syarat kredit yang dapat direlaksasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2015.

Risiko suku bunga juga masih relatif terjaga. Upaya bank menurunkan suku bunga kreditnya telah memperkecil intermediation spread, namun hal

tersebut belum sampai menggerus profitabilitas perbankan secara dalam. Risiko nilai tukar perbankan relatif terjaga seperti terlihat pada rasio Posisi Devisa Neto masih relatif rendah (2,32%). Perbankan nasional cenderung untuk mengambil posisi long valas dalam kondisi penguatan nilai tukar rupiah. Disisi lain, risiko pasar perbankan relatif masih terjaga sejalan dengan volatilitas dan yield SBN yang menurun. Kepemilikan SBN oleh perbankan mengalami peningkatan seiring dengan masuknya dana tax amnesty. Peningkatan kepemilikan SBN perbankan tersebut sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit bank terutama pada portofolio Available for Sale (AFS) serta Hold to Maturity (HTM) sebagai alat likuiditas serta investasi jangka panjang, bukan untuk tujuan perdagangan.

Kinerja perbankan syariah pada periode laporan masih terjaga. Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik. Pertumbuhan aset terutama didorong oleh pertumbuhan pendanaan terutama giro dan deposito. Demikian pula, risiko perbankan syariah terjaga di level yang aman. Risiko likuiditas mengalami sedikit penurunan walaupun masih diatas batas aman. Sementara itu, risiko pembiayaan mengalami perbaikan dengan turunnya rasio NPF. Rasio permodalan yang cukup tinggi menjadi faktor pengaman bagi perbankan syariah dalam menyerap risiko yang timbul.

Seiring dengan perlambatan kredit secara umum, kredit UMKM juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Perlambatan pertumbuhan tersebut diiringi oleh peningkatan risiko kredit UMKM. Pertumbuhan kredit UMKM terutama didorong oleh melambatnya kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Sementara itu, penyaluran KUR juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penyaluran KUR pada posisi yang sama tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, selain

Perbankan yang ditunjuk, terdapat lembaga keuangan berupa Perusahaan Pembiayaan dan Koperasi yang menjadi lembaga penyalur KUR

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) khususnya Perusahaan Pembiayaan (PP) dan Asuransi menunjukkan peningkatan baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan. Sementara itu, risiko pembiayaan IKNB mengalami peningkatan seperti terlihat pada rasio Non Performing Financing (NPF). Keterkaitan antara bank dengan IKNB mengalami peningkatan seperti terlihat dari naiknya kredit perbankan kepada PP dan penempatan dana asuransi pada bank.

Sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri berjalan dengan aman, efisien, lancar, dan handal, sehingga mampu mendukung terpeliharanya stabilitas moneter dan sistem keuangan serta memperlancar kegiatan perekonomian. Kondisi tersebut tercermin dari indikator-indikator sistem pembayaran baik indikator utama maupun indikator pendukung yang secara umum menunjukkan kinerja yang positif. Bank Indonesia melanjutkan upaya-upaya dan kebijakan di bidang sistem pembayaran yang difokuskan pada peningkatan efisiensi perekonomian dengan secara konsisten dan berkesinambungan memperkuat sekaligus mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Risiko sistem pembayaran relatif terjaga baik risiko setelmen, likuiditas, risiko operasional maupun risiko sistemik. Dari sisi risiko setelmen dan likuiditas tercatat relatif rendah pada semester I 2017 yang ditunjukkan oleh rendahnya volume dan nilai unsettled transaction

serta tidak adanya penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) maupun FLI syariah oleh bank peserta sistem Pembayaran BI Nontunai. sementara itu, risiko operasional dan risiko sistemik juga terjaga dengan baik. Dari sisi risiko operasional, Bank Indonesia telah melakukan mitigasi risiko dengan mempersiapkan prosedur Business Continuity Plan yang dapat diaktifkan setiap saat apabila terjadi gangguan pada sistem utama. Dari sisi risiko sistemik, Bank Indonesia melakukan pemantauan secara reguler dan intensif terhadap indikator – indikator sistem pembayaran yang berpotensi menangkap gangguan sistemik.

Penguatan infrastruktur sistem keuangan juga didukung oleh penguatan akses keuangan dari masyarakat melalui layanan keuangan inklusif dan digital. Sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sekaligus sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mendorong masyarakat menggunakan Sistem Pembayaran dan Instrumen Pembayaran Non Tunai, BI telah mencanangkan dan menjalankan berbagai program gerakan non tunai. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengubah semua metode pembayaran dari fisik menjadi digital. Upaya Bank Indonesia tersebut dalam rangka memperluas akses keuangan, meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Beberapa program gerakan non tunai yang telah diimplementasikan maupun yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah antara lain eletronifikasi penyaluran bansos, dana desa, jalan tol, remitansi dan transaksi pemerintah daerah.

Pada Semester I 2017 Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial akomodatif sebagai



instrumen countercyclical. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menahan perlambatan sekaligus mendorong pertumbuhan kredit sehingga turut berkontribusi dalam mempercepat pemulihan ekonomi domestik dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia kembali menetapkan besaran tambahan modal Countercyclical Buffer (CCB) sebesar 0% pada Mei 2017 didasari pada pertimbangan belum adanya indikasi pertumbuhan kredit yang berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya risiko sistemik sebagaimana ditunjukkan oleh Credit to GDP gap sebagai indikator utama CCB dengan didukung indikator pelengkap yaitu indikator makroprudensial, makroekonomi, perbankan dan harga aset.

Implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif tersebut didukung dengan memperkuat fungsi Lender of the last resort (LOLR) sebagai bagian dari peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia (UU BI) yang kemudian ditegaskan kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) pada tahun 2016 dimana Bank Indonesia menyediakan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Fungsi LOLR diperlukan untuk mencegah dan memitigasi instabilitas di sistem keuangan karena kesulitan likuiditas yang dialami suatu bank dapat memicu kegagalan yang kemudian menyebabkan spillover dan contagion effect yang berdampak negatif pada sistem keuangan dan pada akhirnya pada perekonomian. Merespon penyempurnaan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Loan to Funding Ratio (LFR) pada Agustus 2016 dimana Bank Indonesia menaikkan batas bawah LFR dari 78% menjadi 80%, pada semester

I 2017 meskipun rasio LFR mengalami penurunan namun perbankan telah mulai memanfaatkan surat-surat berharga yang diterbitkan sebagai sumber utama pendanaan perbankan tercermin dari jumlah surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bank pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2016. Hal ini sejalan dengan kebijakan memasukkan komponen surat berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan LFR yang bertujuan untuk memperluas sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan. Adapun penurunan LDR dan LFR disebabkan oleh pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit antara lain disebabkan oleh kebijakan tax amnesty seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kinerja sektor properti yang masih lambat mendorong Bank Indonesia melanjutkan kebijakan pelonggaran Loan to Value (LTV) yang telah dilakukan pada 2015. Pelonggaran tersebut mampu menahan penurunan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang diberikan bank meskipun demikian belum cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan kredit atau pembiayaan sehingga diperlukan kebijakan pelonggaran lanjutan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Bank Indonesia kembali melonggarkan kebijakan LTV/FTV dengan mengeluarkan PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value (FTV) untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Penyesuaian ketentuan LTV/FTV mulai menunjukkan perkembangan positif dimana pertumbuhan KPR meningkat dari 6,21% (Agustus 2016) menjadi 7,51% (Juni 2017) meskipun masih di

bawah pertumbuhan total kredit perbankan (7,75%). Dalam lingkup yang lebih luas, kebijakan makroprudensial akomodatif Bank Indonesia didukung pula dengan koordinasi antarotoritas anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini menjadi krusial mengingat terdapat keterkaitan dan/atau irisan pelaksanaan tugas dan kewenangan. Selanjutnya, untuk lebih memperlancar pelaksanaan koordinasi BI dan OJK serta menindaklanjuti UU PPKSK, sampai dengan 15 Juni 2017 telah disusun

dan dilaksanakan 8 (delapan) Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Mekanisme Koordinasi BI-OJK yang ditandatangani oleh ADK OJK dan Gubernur BI. Bank Indonesia dalam menindaklanjuti UU PPKSK juga memperkuat koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan memasuki fase implementasi dimana pada semester I tahun 2017 telah dilakukan pertukaran data dan informasi, riset bersama, dan penerapan atas Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) milik LPS oleh Bank Indonesia.